

## **PENGGANTI PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**

**2020**

**KEPUTUSAN KPU DEMAK NOMOR 84/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VII/2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK NOMOR 84/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA NGALURAN KECAMATAN KARANGANYAR, DESA PIDODO KECAMATAN KARANGTENGAH, DESA BAKUNG KECAMATAN MIJEN, DESA MRANGGEN KECAMATAN MRANGGEN, DESA SIDOREJO KECAMATAN SAYUNG SERTA DESA BUKO DAN DESA KEDUNGMUTIH KECAMATAN WEDUNG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020**

**ABSTRAK** : bahwa KPU Kabupaten Demak telah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap PPDP yang terpilih dan ditemukan beberapa Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat;  
bahwa Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat diganti dengan PPDP lain yang diusulkan oleh Panitia Pemungutan Suara;

### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak ini adalah:**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 56/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 79/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih se Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 83/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Demak Nomor 84/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VII/2020 diatur tentang:**

1. Memberhentikan dengan hormat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam lampiran I;
2. Mengesahkan dan mengangkat nama-nama Pengganti Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana tercantum dalam lampiran II;

3. Pengganti Petugas Pemutakhiran Data Pemilih merupakan petugas yang diangkat oleh Panitia Pemungutan Suara untuk membantu Panitia Pemungutan Suara dalam melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih terhitung mulai tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Demak ini berlaku pada tanggal 10 Juli 2020.  
- Lampiran 4 halaman.